

EFEKTIVITAS KEBIJAKAN DISIPLIN PROTOKOL KESEHATAN
(Studi Kasus di RSUD dr. Mohammad Zyn Kabupaten Sampang, Jawa Timur,
Indonesia)

Maria Ulfa¹, Abdurahman², Rahmad Kurniadi Suroso³
abdurahman.unair@gmail.com

Mahasiswa Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Madura
Dosen Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Madura
Dosen Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Madura

Abstract

Kebijakan Publik Secara umum, istilah “kebijakan” atau “policy” digunakan untuk menunjuk perilaku seorang aktor (misal seorang pejabat, suatu kelompok maupun suatu lembaga pemerintah) atau sejumlah aktor dalam suatu bidang kegiatan tertentu (Winarno, 2007:16). Kebijakan (policy) berbeda dengan kebijaksanaan, karena kebijaksanaan merupakan perwujudan atau pelaksanaan aturan yang telah ditetapkan sesuai situasi dan kondisi setempat oleh pejabat yang berwenang. Dengan mengacu pada teori yang dikemukakan oleh Henry, Bryant dan White dalam Samodra Wibawa, maka perlu adanya pengukuran efektivitas kebijakan public yang menunjukkan apakah suatu kebijakan publik dapat dikatakan baik atau buruk. Jadi, Efektivitas Kebijakan Disiplin Protokol Kesehatan Bagi Pengunjung Rumah Sakit Umum Daerah dr. Mohammad Zyn Kabupaten Sampang dapat dikatakan baik apabila kebijakan yang diterapkan sudah sesuai dengan yang diharapkan. Penelitian ini dilakukan pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. Mohammad Zyn Kabupaten Sampang yang bertempat di kabupaten Sampang. Metode pengumpulan data penentuan informan menggunakan metode purposive sampling dan metode analisa data menggunakan deskriptif kualitatif yang bertujuan untuk mengetahui secara umum mengenai Efektivitas Kebijakan Disiplin Protokol Kesehatan Bagi Pengunjung Rumah Sakit Umum Daerah dr. Mohammad Zyn Kabupaten Sampang. Sumber data yang digunakan berasal dari informan yaitu Staf sub bag. Evaluasi dan pelaporan, staf resepsionis, petugas satpam, dan pengunjung RSUD dr. Mohammad Zyn Kabupaten Sampang. Hasil penelitian dapat diuraikan berdasarkan lima Indikator yang digunakan dapat ditarik kesimpulan bahwa *Pertama*, dalam waktu pencapaian masyarakat sudah semakin meningkat terhadap kebijakan protokol kesehatan yang ada. *kedua*, dari tingkat pengaruh yang diinginkan sudah semakin baik masyarakat sudah mulai terbiasa dengan kebijakan protokol kesehatan yang ada. *ketiga*, perubahan perilaku masyarakat semakin baik sudah menyesuaikan diri dengan protokol kesehatan yang telah ditetapkan di RSUD dr. Mohammad Zyn. *Keempat*, pelajaran yang diperoleh dari pelaksanaan kegiatan rata-rata masyarakat sudah memahami manfaat dari diterapkannya kebijakan protokol kesehatan tersebut dan mematuhi sesuai dengdengan kebijakan yang dibuat. *Kelima*, tingkat kesadaran masyarakat akan kemampuan dirinya saat pandemic semakin tinggi.

Kata kunci; Efektivitas Kebijakan Disiplin Protokol Kesehatan Bagi Pengunjung

Pendahuluan

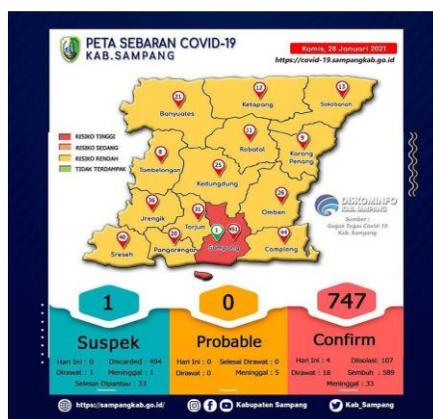
WHO *China Country Office* melaporkan kasus pneumonia yang tidak diketahui etiologinya di Kota Wuhan, Provinsi Hubei, China pada tanggal 31 Desember 2019. China mengidentifikasi pneumonia yang tidak diketahui etiologinya tersebut sebagai jenis baru coronavirus (novel coronavirus). Pada awal tahun 2020 NCP mulai menjadi pandemi global dan menjadi masalah kesehatan di beberapa negara di luar Republik Rakyat Cina (RRC). Berdasarkan *World Health Organization* (WHO) kasus kluster pneumonia dengan etiologi yang tidak jelas di Kota Wuhan telah menjadi permasalahan kesehatan di seluruh dunia. Penyebaran epidemi ini terus berkembang hingga akhirnya diketahui bahwa penyebab kluster pneumonia ini adalah Novel Coronavirus. Pandemi ini terus berkembang hingga adanya laporan kematian dan kasus-kasus baru di luar China pada tanggal 7 Januari 2020. Pada WHO menetapkan COVID-19 sebagai *Public Health Emergency of International Concern* (PHEIC) / Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Yang Meresahkan Dunia (KKMMD) pada tanggal 30 Januari 2020. Pada tanggal 12 Februari 2020, WHO resmi menetapkan penyakit novel coronavirus pada manusia ini dengan sebutan *Coronavirus Disease* (COVID-19).

Kasus Covid-19 yang merupakan pandemi global jelas menimbulkan kekhawatiran dari beragam kalangan, khususnya masyarakat. Kekhawatiran masyarakat semakin sangat terasa dengan melihat lonjakan kasus yang cukup cepat, dan melihat kurangnya kesiapan beberapa elemen yang cukup vital guna “memerangi” virus corona. Melihat tingginya tingkat persebarannya yang begitu cukup mengharuskan pemerintah untuk segera mengambil langkah strategis. Dengan menetapkan kebijakan-kebijakan antisipatif untuk mengatasi dampak dari COVID-19. (Ristyawati, 2020)

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan menjadi dasar hukum dari adanya kebijakan antisipatif tersebut. Pengertian Pembatasan Sosial Berskala Besar adalah pembatasan kegiatan tertentu penduduk dalam suatu wilayah yang diduga terinfeksi Corona Virus Disease 2019 (COVID19) sedemikian rupa untuk mencegah kemungkinan penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).

Instruksi Presiden (INPRES) Nomor 6 Tahun 2020 Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Dalam Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019.

Dalam Perbup No. 53 Tahun 2020 tentang penerapan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan sebagai upaya pencegahan dan pengendalian corona virus disease 2019 (COVID-19). ada kewajiban untuk penerapan prokes termasuk pada saat ada masyarakat yang melanggar, maka ada sanksi yang berlaku sesuai aturan. Sanksi yang akan diterapkan tidak serta merta dilakukan sanksi denda melainkan masih ada tahapannya yaitu berupa sanksi teguran hingga mengisi surat pernyataan. Ketika masih melanggar, baru nanti beralih ke sanksi yang lebih berat berupa denda uang Rp 100 ribu. Jadi sanksi denda itu yang terakhir.



Sumber : GugusTugas Covid-19 Kabupaten Sampang

Berikut adalah peta persebaran covid-19 yang berada di wilayah Kabupaten Sampang per hari ini, Kamis 28 Januari 2021. Dari seluruh kecamatan Se-Kabupaten Sampang dengan rincian:

1. Suspek : 1
2. Probable : 0
3. Confirm : 747

Perlu diketahui bahwa Suspek dan Probable belum tentu Confirm Covid-19. Data Pasien Covid-19 yang ditangani di RSUD dr. Mohammad Zyn Kabupaten Sampang Tahun 2020.

Tabel 1.1

No.	Bulan	Jumlah Pasien yang dirawat	Jumlah Pasien Sembuh
1	April	35 Orang	3 Orang
2	Mei	74 Orang	11 Orang
3	Juni	61 Orang	14 Orang
4	Juli	48 Orang	26 Orang
5	Agustus	18 Orang	6 Orang

Pada era saat ini Masalah Covid-19 sangatlah membuat kekhawatiran bagi semua orang. Maka dari itu presiden menerapkan Protokol kesehatan Bagi semua Masyarakat. Dengan menerapkan protokol ini diharapkan dapat meminimalisir risiko dan dampak pandemi Covid-19 pada usaha sektor jasa dan perdagangan (area publik) dimana terdapat potensi penularan Covid-19.

Kajian Pustaka

1. Kebijakan Publik

Pengertian Kebijakan Publik dapat dicermati dalam uraian berikut: Kebijakan Publik terdiri dari dua suku kata “kebijakan” dan “publik”. Pengertian kebijakan, dalam kamus bahasa Indonesia dijelaskan bahwa kebijakan secara literalite dapat dijelaskan sebagai kepandaian, kemahiran, kebijaksanaan, sementara secara bahasa kebijakan dapat dijelaskan sebagai rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis besar dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, cara bertindak. Misalnya kebijakan ekonomi adalah kebijakan suatu pemerintah untuk mengatur dan mengawasi pertumbuhan dan aktivitas ekonomi dalam negaranya. Atau kebijakan politik adalah sistem konsep resmi yang menjadi landasan tingkah laku politik negara. (Muchsini,2007:44)

Kebijakan Publik Secara umum, istilah “kebijakan” atau “policy” digunakan untuk menunjuk perilaku seorang aktor (misal seorang pejabat, suatu kelompok maupun suatu lembaga pemerintah) atau sejumlah aktor dalam suatu bidang kegiatan tertentu (Winarno, 2007:16). Kebijakan (policy) berbeda dengan kebijaksanaan, karena kebijaksanaan merupakan perwujudan atau pelaksanaan aturan yang telah ditetapkan sesuai situasi dan kondisi setempat oleh pejabat yang berwenang. Public atau publik adalah masyarakat itu sendiri, yang selayaknya diurus, diatur, dan dilayani oleh pemerintah sebagai administrator, tetapi juga sekaligus bertindak sebagai penguasa dalam pengaturan hukum tata negaranya (Syafi'ie, 2006:104). Menurut William N. Dunn (Syafi'ie, 1997:107), kebijakan publik adalah suatu rangkaian pilihan-pilihan yang saling berhubungan yang dibuat oleh lembaga atau pejabat pemerintah pada bidang-bidang yang menyangkut tugas pemerintahan, seperti pertahanan keamanan, energi, kesehatan, pendidikan, kesejahteraan masyarakat, kriminalitas, perkotaan dan lain-lain. Pernyataan Winarno dan Dunn mengenai kebijakan publik ini diartikan sebagai pilihan-pilihan tindakan yang saling berkaitan, dibuat 11 oleh lembaga atau pejabat pemerintah yang berhubungan dengan tugas-tugas pemerintahan, yaitu berbagai persoalan publik yang merupakan tanggungjawab pemerintah. Serangkaian pilihan tindakan tersebut diputuskan sebagai strategi untuk merealisasikan tujuan pemerintah dalam hal yang bersangkutan karena setiap tindakan selalu dipengaruhi dengan ancaman maupun peluang di sekitarnya. Dengan demikian, kebijakan yang diusulkan tersebut bertujuan untuk menggali potensi sekaligus mengatasi hambatan yang ada. Program Protokol kesehatan yang dilakukan dalam upaya pencegahan penularan Virus Corona (Covid-19) merupakan salah satu bentuk kebijakan publik karena program tersebut merupakan tindakan yang dibuat lembaga pemerintah yaitu Ketua Satuan Tugas (Satgas) dengan tujuan dapat mengurangi jumlah Penyebaran Virus Covid-19.

2. Pengertian Efektivitas

Efektivitas adalah suatu kosa kata dalam Bahasa Indonesia yang berasal dari bahasa inggris yaitu: “Effective” yang berarti berhasil ditaati, mengesahkan, mujarab dan mujur. Dari sederetan arti di atas, maka yang paling tepat adalah berhasil dengan baik. Jika seseorang dapat bekerja dengan baik maka ia dapat dikatakan bekerja dengan efektif. Dalam pelaksanaan kerja selalu memakai 5 sumber usaha yaitu Pikiran, Tenaga, Waktu, Uang, dan Benda. Walaupun gabungan yang berbeda untuk masing-masing jenis pekerjaan pada umumnya orang melakukan kegiatan tertentu ingin memperoleh hasil yang maksimal. Tetapi

permasalahan efektivitas itu menyangkut banyak hal, oleh karena itu para ahli memberikan defenisi yang beragam untuk menjelaskan apa arti batasan dari pengertian efektivitas itu.

Kata efektif memiliki konotasi atau berkaitan dengan banyak hasil yang dicapai, sehingga efektif atau efektivitas dapat diartikan sebagai tingkat atau derajat pencapaian hasil yang diharapkan. Semakin besar hasil yang didapat /diraihnya berarti menjadi semakin efektif.

3. Ukuran Efektivitas Kebijakan

Menurut Solichin Abdul Wahab, pengukuran atau penilaian efektifitas suatu proyek atau program hanya mungkin dilakukan kalau dokumen atau data proyek tersebut menunjukkan hal-hal berikut:

- a) Tujuan-tujuan proyek dirumuskan dengan jelas dan dalam bentuk pernyataan-pernyataan yang terukur (*measurable*).
- b) Pengukuran terhadap perbaikan kinerja organisasi dalam sebuah proyek yang dimaksudkan untuk pengembangan bukan hanya merupakan persoalan yang agak *ilusif*, tetapi juga *sensitive*.
- c) Kemampuan untuk mengukur tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya dalam program atau proyek tersebut, apakah efektif atau tidak efektif.
- d) Apabila suatu saat evaluator mengalami kesulitan dalam mengukur efektifitas suatu proyek karena tujuannya dirumuskan secara kabur atau dalam bentuk pernyataan-pernyataan yang ambisius, maka perhatian khusus studi evaluasi harus diberikan pada cara-cara bagaimana tujuan-tujuan dirumuskan dan aktor-aktor manakah yang terlibat di dalamnya.
- e) Evaluator kemungkinan juga menghadapi masalah bahwa atasannya mempunyai penafsiran berbeda terhadap tujuan proyek, sebagaimanahalnya perbedaan penafsiran antara pelaksana proyek dengan evaluator sendiri (Wahab, 2003).

Menurut Solichin Abdul Wahab, hasil akhir efektifitas program atau proyek dapat diukur dengan persamaan berikut:

$$\text{EFEKTIVITAS} = \frac{\text{HASIL}}{\text{TUJUAN}}$$

Pada jenis evaluasi *ex ante* dan evaluasi *ex post* biasa muncul persoalan yang menyangkut pengukuran biaya (*cost*) dan manfaat (*benefit*). Dalam keadaan biaya dan manfaat tersebut dapat dinyatakan dalam harga pasar maka, biasanya digunakan analisis biaya-manfaat (*cost-benefit analysis*). Kalau misalnya hanya aspek biaya saja yang dapat dinyatakan dalam harga pasar, sedangkan aspek manfaat tidak, maka orang biasanya menggunakan analisis efektifitas biaya (*cost-effectiveness analysis*), kendala terbesar dari analisis biaya manfaat adalah dalam menentukan akibat-akibat fungsional dan disfungsioanl apakah yang terkait langsung dengan proyek dan bagaimanakah akibat-akibat itu dapat di evaluasi (Wahab, 2003).

Sedangkan teori lain yang mengemukakan tentang evaluasi efektivitas adalah, menurut William Dunn yang menyatakan bahwa : Efektivitas merupakan salah satu indicator atau criteria evaluasi kebijakan. Terdapat 6 indikator dalam evaluasi kebijakan menurut Dunn yaitu:

1. Efektivitas,
2. Efisiensi,
3. Kecukupan(*adequacy*),
4. Pemerataan,
5. Responsifitas ,
6. dan ketepatan.

Dunn menggunakan teori evaluasi efektifitas berkaitan dengan pertanyaan “ apakah hasil yang di inginkan telah dicapai, mengkaji apakah pelaksanaannya sesuai dengan sasaran & tujuan, dan apakah dampaknya sesuai dengan yang diinginkan, serta biaya dan manfaatnya sebanding”. Indikator efisiensi berkaitan dengan pertanyaan Seberapa banyak upaya yang diperlukan untuk mencapai hasil yang diinginkan, indikator kecukupan (*adequacy*) berkaitan dengan pertanyaan Seberapa jauh pencapaian hasil yang diinginkan untuk memecahkan

masalah, indikator pemerataan berkaitan dengan pertanyaan Apakah biaya manfaat didistribusikan secara merata kepada kelompok-kelompok yang berbeda?, indikator responsifitas berkaitan dengan pertanyaan Apakah hasil kebijakan memuaskan kebutuhan/preferensi atau nilai-nilai kelompok tertentu?, dan indikator ketepatan berkaitan dengan pertanyaan Apakah hasil (tujuan) yang diinginkan benar-benar berguna atau bernilai (Dunn, 2003)”

Dari beberapa teori di atas tentang Evaluasi Efektivitas yang telah dikemukakan, penulis cenderung menggunakan teori Evaluasi Efektivitas yang di kemukakan oleh Solichin Abdul Wahab yang menyatakan bahwa Efektifitas merupakan perbandingan antara hasil dengan tujuan yang ingin dicapai. Pengukuran efektivitas kebijakan publik. Menurut Henry, Bryant dan White dalam Samodra Wibawa, dkk (1994:65) mengusulkan beberapa kriteria selain tujuan dan target untuk dapat mengukur efektivitas implementasi program sebagai berikut :

a. Waktu pencapaian

Kriteria waktu pencapaian ini membandingkan antara kerangka waktu dalam mana perubahan itu diharapkan terjadi dengan waktu yang dibutuhkan agar perubahan tersebut tercapai (Henry, 1988: 233).

b. Tingkat pengaruh yang diinginkan

Kriteria tingkat pengaruh yang diinginkan ini melihat taraf pengaruh yang hendak dicapai dan sejauh mana pengaruh yang diinginkan dapat dicapai setelah adanya program. (Henry, 1988:233)

c. Perubahan perilaku masyarakat

Dengan adanya program tersebut diharapkan adanya perubahan perilaku masyarakat. Apakah masyarakat mengadopsi teknologi baru, atau apakah mereka setuju menyesuaikan praktek - praktek tradisionalnya. (Bryan, 1987:199)

d. Pelajaran yang diperoleh dari pelaksanaan kegiatan

Pada kriteria ini, apakah pelaksana proyek telah memetik pelajaran dari pengalaman proyek dan mengubah proses keputusannya agar sesuai dengan tugas pembangunan. (Bryan, 1987: 199).

e. Tingkat kesadaran masyarakat akan kemampuan dirinya

Dengan adanya program tersebut, apakah program telah berhasil menggerakkan masyarakat dan menambah kesadaran mereka mengenai kemampuan mereka sendiri. (Bryan, 1987: 200)

4. Peraturan Perundang-undangan Protokol kesehatan

Instruksi Presiden (INPRES) dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Dalam Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019. Peraturan bupati nomer 53 tahun 2020 tentang penerapan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan sebagai upaya pencegahan dan pengendalian corona virus disease 2019 (COVID-19). Dalam hal ini RSUD dr. Mohammad Zyn diminta untuk memenuhi, mematuhi dan melaksanakan peraturan bupati tersebut sebagaimana berikut :

1. Perkantoran menyiapkan sarana dan prasana 4 M (memakai masker dikantor maupun diluar kantor, mencuci tangan pakai sabun, menjaga jarak dan menghindari kerumunan).
2. Bagi pelaku usaha, pengelola, penyelenggara, atau penanggung jawab tempat dan fasilitas umum menyiapkan sarana dan prasarana 4 M bagi karyawan dan pengunjung yang datang.
3. Berikut disampaikan sanksi apabila tidak mematuhi peraturan bupati tersebut berupa;

a. Bagi perorangan :

1. teguran lisan yang diikuti sanksi ringan berupa menyanyikan Lagu Kebangsaan Indonesia Raya dan mengucapkan Dasar Negara Pancasila;
2. Teguran tertulis dengan surat pernyataan sanggup mematuhi Protokol Covid-19 dan/atau penyitaan sementara identitas diri;
3. Kerja sosial berupa membersihkan fasilitas umum;
4. denda administratif paling tinggi Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).

b. Bagi pelaku usaha, pengelola, penyelenggara, atau penanggung jawab tempat dan fasilitas umum:

1. teguran lisan atau teguran tertulis;

2. penghentian sementara operasional usaha; dan
3. pencabutan izin usaha;
4. denda administratif paling tinggi Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

Metode Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. Mohammad Zyn Kabupaten Sampang yang bertempat di kabupaten Sampang. Metode pengumpulan data penentuan informan menggunakan metode purposive sampling dan metode analisa data menggunakan deskriptif kualitatif yang bertujuan untuk mengetahui secara umum mengenai Efektivitas Kebijakan Disiplin Protokol Kesehatan Bagi Pengunjung Rumah Sakit Umum Daerah dr. Mohammad Zyn Kabupaten Sampang. Sumber data yang digunakan berasal dari informan yaitu Staf sub bag. Evaluasi dan pelaporan, staf resepsionis, petugas satpam, dan dua pengunjung RSUD dr. Mohammad Zyn Kabupaten Sampang.

Hasil Penelitian

Efektivitas Kebijakan Disiplin Protokol Kesehatan Bagi Pengunjung RSUD dr. Mohammad Zyn Kabupaten Sampang.

Efektivitas sering digunakan sebagai konsep tentang efektivitas dimana sebuah organisasi bertujuan untuk menghasilkan. Organizational effectiveness (efektivitas organisasi) dapat dilakukan dengan memperhatikan kepuasan, pencapaian visi organisasi, pemenuhan aspirasi, pengembangan sumber daya manusia organisasi dan aspirasi yang memiliki, serta memberikan dampak positif bagi masyarakat.

Pengukuran efektivitas kebijakan publik Menurut Henry, Bryant dan white dalam Samodra Wibawa, dkk (1994:65) mengusulkan beberapa kriteria selain tujuan dan target untuk dapat mengukur efektivitas implementasi program sebagai berikut:

1) Waktu pencapaian

Kriteria waktu pencapaian ini membandingkan antara kerangka waktu dalam mana perubahan itu diharapkan terjadi dengan waktu yang dibutuhkan agar perubahan tersebut tercapai. (Henry, 1988: 233)

Dari hasil penelitian dalam tahap waktu pencapaian ini peneliti dapat menginterpretasikan bahwa perbandingan jumlah pengunjung dalam hal mematuhi kebijakan protokol kesehatan dari awal adanya pandemi covid-19 dari bulan maret sampai saat ini semakin meningkat. Mayoritas masyarakat sudah mematuhi protokol kesehatan yang ada baik dilihat dari kedisiplinan petugas dalam menjalankan peraturan yang ada maupun kepedulian masyarakat itu sendiri. Meningkatnya kepatuhan pengunjung juga disebabkan oleh kebijakn protokol kesehatan yang semakin diperketat seperti pintu masuk area RSUD semuanya ditutup hanya pintu tengah yang bisa dilewati oleh pengunjung. dan disitu ada petugas yang akan mengecek suhu dengan alat termometer digital, menggunakan masker, dan akan diminta untuk mencuci tangan dengan handsanitizer yang telah disediakan. Setelah itu baru pengunjung diperbolehkan memasuki area lingkungan RSUD.

Jadi, kepatuhan pengunjung terhadap kebijakan disiplin protokol kesehatan dari awal pandemi sampai saat ini semakin meningkat. Karena saat ini RSUD semakin memperketat kebijakan protokol kesehatan yang diterapkan di RSUD dr. Mohammad Zyn. Pengunjung harus mematuhi kebijakan protokol kesehatan yang ada supaya diperbolehkan masuk oleh petugas.

2) Tingkat pengaruh yang diinginkan

Kriteria tingkat pengaruh yang diinginkan ini melihat taraf pengaruh yang hendak dicapai dan sejauh mana pengaruh yang diinginkan dapat dicapai setelah adanya program. (Henry, 1988:233)

Dalam tahap ini peneliti dapat menginterpretasikan bahwa pengaruh kebijakan protokol kesehatan yang sudah diterapkan di RSUD membuat masyarakat semakin baik. Masyarakat sudah mulai terbiasa dan menerima adanya kebijakan protokol kesehatan tersebut. Tidak seperti diawal adanya pendemi, beberapa pengunjung ada yang ketika tidak diijinkan masuk karena lupa tidak membawa masker pengunjung tersebut marah dan tidak terima. Padahal sudah jelas ada banner yang bertuliskan “wajib menggunakan masker bagi seluruh pasien dan pengunjung RSUD dr. Mohammad Zyn”.

Jadi pengaruh kebijakan protokol kesehatan menjadikan masyarakat saat ini sudah lebih banyak yang mematuhi kebijakan protokol kesehatan tersebut. Hanya satu atau dua

orang pengunjung saja yang terkadang masih harus dijelaskan terlebih dahulu baru pengunjung tersebut mematuhi kebijakan yang ada. ada juga yang tanpa dijelaskan ketika si pengunjung tidak memakai masker, saat melihat petugas pengunjung tersebut akhirnya tidak jadi masuk ke area lingkungan RSUD.

3) Perubahan perilaku masyarakat

Dengan adanya program tersebut diharapkan adanya perubahan perilaku masyarakat. Apakah masyarakat mengadopsi teknologi baru, atau apakah mereka setuju menyesuaikan praktek-praktek tradisionalnya. (Bryan, 1987:199)

Dalam hal perubahan perilaku masyarakat peneliti dapat menginterpretasikan bahwa perubahan perilaku masyarakat mengarah pada proses yang positif. Dari yang awalnya tidak mengenal masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Dengan adanya kebijakan protokol kesehatan ini, masyarakat sudah mulai mengerti baiknya memakai masker, mencuci tangan dan menjaga jarak supaya terhindar dan tidak menularkan virus covid-19 yang saat ini semakin meningkat dan juga terhindar dari penyakit lainnya yang dapat menularkan melalui udara. Jika dibandingkan dengan awal pandemi perilaku masyarakat saat ini lebih menerima dan terbiasa dengan kebijakan protokol kesehatan tersebut. Namun dalam hal ini pasti masih terdapat beberapa orang pengunjung yang masih sedikit kesulitan dalam mematuhi kebijakan protokol kesehatan seperti lupa tidak menggunakan masker karena diluar area RSUD pengunjung tersebut tidak terbiasa memakai masker.

Jadi dengan adanya dan terus diterapkannya kebijakan protokol kesehatan ini selama pandemi membuat perilaku masyarakat semakin baik. dari yang awalnya belum terbiasa dan tidak menyadari pentingnya kebijakan ini menjadi terbiasa.

4) Pelajaran yang diperoleh dari pelaksanaan kegiatan

Pada kriteria ini, apakah pelaksana proyek telah memetik pelajaran dari pengalaman proyek dan mengubah proses keputusannya agar sesuai dengan tugas pembangunan. (Bryan, 1987: 199)

Hasil penelitian dalam tahap pelajaran yang diperoleh dari pelaksanaan proyek ini peneliti dapat menginterpretasikan bahwa sebagian besar masyarakat sudah memahami manfaat dari diterapkannya kebijakan protokol kesehatan yang ada. seperti menggunakan masker saat berada di area lingkungan RSUD, mencuci tangan dengan handsanitizer yang sudah disediakan, dan menjaga jarak atau dengan tidak menduduki tempat duduk yang diberi tanda silang. Dari masyarakat yang memahami manfaat kebijakan protokol kesehatan beberapa diantaranya yaitu pengunjung yang sudah pernah diberikan penjelasan oleh petugas dan pengunjung yang memang sudah memahami sendiri manfaat dari diterapkannya kebijakan protokol kesehatan dan pengunjung seperti ini biasanya yakin dengan adanya pandemi covid-19, tanpa dijelaskanpun pengunjung ini sudah pasti patuh terhadap kebijakan protokol kesehatan yang ada.

Jadi masyarakat lebih banyak yang sudah memahami atau menyadari pentingnya dari diterapkannya kebijakan protokol kesehatan yaitu guna mencegah penularan covid-19 yang jika terpapar dapat merugikan pengunjung sendiri dan orang lain. Masyarakat juga sudah menerapkannya sesuai dengan kebijakan yang dibuat. Meskipun pada kenyataannya ada beberapa pengunjung yang mematuhi hanya karena supaya diperbolehkan masuk.

5) Tingkat kesadaran masyarakat akan kemampuan dirinya

Dengan adanya program tersebut, apakah program telah berhasil mengerakkan masyarakat dan menambah kesadaran mereka mengenai kemampuan mereka sendiri. (Bryan, 1987: 200)

Dari hasil penelitian dalam tahap tingkat kesadaran masyarakat akan kemampuan dirinya peneliti dapat menginterpretasikan bahwa kesadaran masyarakat semakin tinggi. Apalagi dengan keadaan saat ini semakin meningkatnya penyebaran virus Covid-19 yang membuat masyarakat menjadi lebih khawatir dan waspada terhadap diri sendiri dan lingkungan sekitarnya. Rata-rata tiap pengunjung sudah memakai masker dan membawa handsanitizer sendiri. Dengan keadaan sekarang kebijakan protokol kesehatan yang diterapkan di RSUD juga semakin diperketat supaya dapat mengurangi penyebaran virus Covid-19 yang semakin meningkat ini. Dengan keadaan saat ini ternyata masih ada segelintir orang yang menganggap covid-19 hanya sebuah konspirasi. Tapi ketika berada di area

lingkungan RSUD dr. Mohammad Zyn apapun alasannya masyarakat dituntut untuk tetap mematuhi kebijakan protokol kesehatan tersebut.

Jadi kesadaran masyarakat terkait kebijakan pemerintah mengenai protokol kesehatan ini semakin meningkat. Masyarakat rata-rata sudah banyak yang selalu memakai masker dan beberapa ada yang membawa handsanitizer sendiri.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil dari penelitian Efektivitas Kebijakan disiplin Protokol Kesehatan Bagi Pengunjung di RSUD dr. Mohammad Zyn Kabupaten Sampang, mengenai hasil peneliti maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Waktu pencapaian

Dari hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa Kepatuhan masyarakat dimasa pandemi sudah efektif. Kepatuhan pengunjung terhadap kebijakan protokol kesehatan dari awal pandemi mulai dari bulan maret sampai saat ini kepatuhan masyarakat semakin meningkat. Karena RSUD semakin memperketat kebijakan protokol kesehatan yang diterapkan di RSUD dr. Mohammad Zyn. Sehingga mau tidak mau masyarakat harus mematuhi kebijakan protokol kesehatan yang ada.

2. Tingkat pengaruh yang diinginkan

Dari hasil wawancara ini dapat disimpulkan bahwa RSUD sudah benar-benar menerapkan kebijakan protokol kesehatan tersebut. Masyarakat kebanyakan sudah menerapkan kebijakan protokol kesehatan yang ada. hanya ada beberapa pengunjung saja yang kadang memang harus ditegor dan dijelaskan secara rinci mengenai kebijakan tersebut. Dengan begitu, pengunjung yang tadinya kurang mematuhi setelah dijelaskan secara rinci pengunjung tersebut akan lebih mematuhi. Jadi kesadaran masyarakat dalam menerapkan kebijakan protokol kesehatan bisa dibilang semakin meningkat.

3. Perubahan perilaku masyarakat

Dari hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa perubahan perilaku masyarakat dengan adanya kebijakan protokol kesehatan dimasa pandemi sudah efektif. Masyarakat sudah lebih menerima dan terbiasa dengan kebijakan protokol kesehatan yang ada. hanya ada beberapa pengunjung yang terkadang lupa memakai masker karena diluar RSUD terbiasa tidak memakai masker. Tapi setelah diingatkan pengunjung tersebut langsung menyadari dan mematuhi.

4. Pelajaran yang diperoleh dari pelaksanaan kegiatan

Dari hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa sebagian besar masyarakat sudah memahami manfaat dari kebijakan protokol kesehatan yang ada. hanya beberapa pengunjung saja yang terkadang masih perlu diberikan penjelasan dari petugas terkait manfaat kebijakan protokol kesehatan tersebut. jadi sebagian besar masyarakat sudah memahami dan mengikuti kebijakan protokol kesehatan sesuai dengan yang sudah diterapkan di RSUD dr. Mohammad Zyn.

5. Tingkat kesadaran masyarakat akan kemampuan dirinya

Dari hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa kesadaran masyarakat semakin meningkat. Selain dipaksa dengan kebijakan yang ada, masyarakat juga khawatir dengan diri sendiri dan juga lingkungan sekitar. apalagi saat ini virus covid-19 penyebarannya semakin meningkat yang membuat masyarakat semakin sadar akan pentingnya diterapkannya kebijakan protokol kesehatan tersebut. hanya segelintir orang yang kesadarannya masih kurang seperti, menduduki tempat yang diberi tanda silang. Tapi mau bagaimanapun masyarakat tetap harus mematuhi kebijakan protokol kesehatan yang ada.

Maka dari hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas kebijakan disiplin protokol kesehatan bagi pengunjung di RSUD dr. Mohammad Zyn kabupaten sampang dinyatakan efektif seperti (1) dalam waktu pencapaian kepatuhan masyarakat terhadap kebijakan protokol kesehatan diawal pandemi dari bulan maret sampai saat ini semakin meningkat. (2)

ISSN Online: 25412213

ISSN OFline: 25026984

dalam tingkat pengaruh yang diinginkan sudah semakin baik, masyarakat sudah mulai terbiasa dengan kebijakan protokol kesehatan yang ada. (3) dalam perubahan perilaku masyarakat, sudah semakin baik dan sudah menyesuaikan diri dengan protokol kesehatan yang telah ditetapkan. (3) dalam pelajaran yang diperoleh dari pelaksanaan kegiatan sebagian besar masyarakat sudah memahami dan mengikuti kebijakan protokol kesehatan sesuai dengan yang sudah diterapkan. (4) dalam tingkat kesadaran masyarakat akan kemampuan dirinya, kesadaran masyarakat semakin meningkat selain dipaksa dengan kebijakan masyarakat menyadari akan pentingnya diterapkannya kebijakan protokol kesehatan di RSUD.

Referensi

Inpres no.6 tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Dalam Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019.

Miles, Huberman, & Saldana. (2014). *Qualitative Data Analysis, A Methods Sourcebook*, Edition 3. USA: Sage Publications.

Moleong, Lexy. J. 2016. *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.

Muchsin, (2007). "Politik Hukum Pendidikan Nasional", Pasca Sarjana Universitas SunanGiri Surabaya, Sidoarjo.

Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung : Alfabeta, CV.

Sulistiyawati, Titien. 2013 "Menyoroti Efektivitas Kehadiran Undang-undang nomor 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga (PKDRT). publikjurnalilmiahadministrasi negara).

Salamah Erwin dan Ali. "Efektivitas Program Revitalisasi Pasar Ir. Soekarno Kab. Sukoharjo" *Jurnal Wacana Publik*, Vol 1 No.4 halm 21-29, 2020

Ristiyawati, Aprista. 2020. efektivitas kebijakan pembatasan social berskala besar dalam masa pandemi corona virus 2019 oleh pemerintah sesuai amanat Undang-undang dasar NNRI Tahun 1945, Tembalang semarang, journal diakses pada tanggal 4 November 2020

<http://www.landasanteori.com/2015/10/pengertian-efektivitas-kerja-adalah.html>

<http://literaturbook.blogspot.co.id/2014/12/pengertian-efektivitas-dan-landasan.html>

<http://eprints.uny.ac.id/18592/4/BAB%20II%2010417141029.pdf>

<https://www.alodokter.com/covid-19>

<https://jurnal.uns.ac.id/wacana-publik/article/viewFile/18202/30894>